KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU
DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI PEKANBARU

Kurnia Putra Jasty

Email : putra.chupu@gmail.com

Dibimbing oleh Drs. Chalid Sahuri, MS

Program Studi Administrasi Negara Fisip Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru
28293,telp/fax(0761) 63277

Abstract

The purpose of this study was to determine the performance of the Department of Social and Pekanbaru City Cemetery under Development of Street Children in the city of Pekanbaru and to know what are the factors that hinder the performance of Department of Social Welfare and Development In Pekanbaru City Cemetery Street Children in the city of Pekanbaru in Pekanbaru . Theory (approach) is used as an analytical tool in this study is the theory of performance indicators efficiency , effectiveness , fairness , and responsiveness . While the methods used in this research is descriptive qualitative research that is intended to provide a systematic overview of the observed phenomena .Based on these results , Performance and Social Service Funeral Pekanbaru City , particularly the field of POM in dealing with street children is still not good . Efforts undertaken in the field of POM handle street children include coaching , mental guidance , and the provision of venture capital . However , the recruitment of street children conducted by the Department of Social Welfare and Funeral Pekanbaru City has not reached the desired target . Obstacles encountered in handling the business of street children is the attitude or mindset of street children who do not want to set a target , causing stunted POM field program . Another problem is the limited human resources in both the Department of Social and Pekanbaru City Cemetery is the source of the lack of budget funds . The process of mentoring street children street children should be done to the self . Supervision of the assistance also needs to be done.

Keywords : efficiency , effectiveness , fairness , responsiveness

PENDAHULUAN

Makin meningkatnya jumlah anak jalanan di Pekanbaru yang seharusnya masih berada di bangku pendidikan, namun karena banyak faktor, terpaksa harus turun ke jalan demi sesuap nasi hanya untuk bertahan hidup, menyebabkan masalah sosial. Mereka banyak yang terpaksa harus bekerja, padahal sesuai usia, mereka seharusnya berada di sekolah. Pekerjaan yang

mereka lakukan bermacam-macam, mulai dari pemulung, pengemis, kernet angkutan umum, tukang lap kaca mobil, tukang semir sepatu, jualan koran, dan masih banyak pekerjaan lain yang terpaksa harus mereka lakukan dengan tujuan bisa makan. Namun, walaupun mereka bekerja dengan benar tanpa harus terjun kedalam dunia kriminal, dengan menjadi pencopet misalnya, ternyata mereka bukan tidak memiliki

hambatan dan kesulitan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, ternyata hambatan dan kesulitan yang mereka alami datangnya dari pemerintah, yang mana seharusnya menjadi pelindung dan pengayom mereka sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”.

Kesulitan dan hambatan yang dialami oleh anak jalanan di Pekanbaru yang datangnya dari pemerintah ini bisa terjadi dari banyak hal. Contoh kasus yang paling sering terjadi adalah razia (penjaringan) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dalam hal ini, pemerintah melakukan razia (penjaringan) adalah untuk melaksanakan amanat Undang-undang dalam hal menjaga ketenteraman umum, sehingga pemerintah tidak bisa disalahkan. Namun jika kita melihat kesisi anak jalanan, hal tersebut juga tidak sepenuhnya salah mereka. Razia (penjaringan) yang dilakukan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman ini berakibat banyak bagi para anak jalanan. Akibat seringnya terkena razia (penjaringan) menyebabkan beberapa anak jalanan dengan terpaksa harus berhenti dari pekerjaan yang dilakukannya. Ketika hal ini berlangsung lama, sementara anak jalanan harus tetap memenuhi kebutuhan makan untuk tetap hidup, maka tak jarang pilihan terakhir dari anak jalanan adalah dengan melakukan tindak kriminal. Tak jarang beberapa anak jalanan terpaksa harus menjadi pencopet dan maling hanya untuk mencari uang makan.

Hal tersebut diatas seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam hal penanganan pembinaan anak jalanan adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai visi :

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang tertib dan indah”. Sedangkan misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Kerja.
- d. Mensosialisasikan Bantuan Kesejahteraan Sosial
- e. Mengembangkan / meningkatkan Prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara optimal dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- f. Mewujudkan Pemakaman yang Tertib dan Indah.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah, sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman

2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial dan pemakaman
3. Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman
4. Melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas dibidang sosial dan pemakaman
5. Membina Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
6. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya di atas.

Menurut pengamatan peneliti pada tahun 2013 di setiap persimpangan lampu merah terdapat 3 sampai 5 orang anak jalanan mulai dari simpang SKA, simpang Harapan raya, Sudirman, simpang Pasar Pagi Arengka, hingga persimpangan Jalan Riau- Yos Sudarso. Tidak sedikit dari anak jalanan tersebut juga berusaha untuk mencari nafkah di jembatan-jembatan penyeberangan. Profesi mereka juga beragam. Ada yang menjadi pengemis, tukang lap kaca mobil, jualan koran, tukang semir sepatu, dan masih banyak profesi lain. Mereka tidak memperhatikan keselamatan jiwa, hanya untuk mendapatkan sedikit rupiah .

Dinas Sosial dan Pemakaman sendiri memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial berdasarkan azas otonomi daerah dan memiliki fungsi merumuskan kebijakan teknis dibidang sosial meliputi pelayanan dan pemberdayaan sosial, bantuan dan perlindungan sosial, penyelenggaraan

urusan sosial, pembinaan pelayanan dan pemberdayaan sosial serta bantuan dan perlindungan sosial. Hal ini dirasa memprihatinkan karena berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 20 menjelaskan bahwa “ *negara, pemerintah dan masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak* “.

Ketika hal tentang penanganan dan pembinaan ini dilimpahkan kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, mereka mengatakan bahwa masalah tersebut bukan hal yang mudah. Masalah yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemakaman terkait dengan penanganan dan pembinaan anak jalanan dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

“ Sulitnya pendekatan terhadap anak jalanan ketika akan didata dan dibina, sehingga perlu pendekatan yang lebih khusus dan lembut terhadap anak jalanan. Selain itu pola pikir yang menginginkan sesuatu dengan cara yang instan tanpa berusaha serta kurangnya kemauan dari anak jalanan sendiri untuk berubah, turut mempersulit pembinaan terhadap anak jalanan. Kemudian masih kurangnya Dinas Sosial dan Pemakaman dalam memberikan sosialisasi tentang bahaya anak berada di jalan turut berpengaruh terhadap penambahan jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru. Terbukti dari keluarga yang tidak melarang anaknya menjadi anak jalanan. Sebenarnya orang tua juga tidak menginginkan anaknya menjadi anak jalanan tetapi keadaan ekonomi yang semakin sulit membuat

anak-anak turut serta mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan sehingga dengan terpaksa menjadi anak jalanan.” (Wawancara dengan salah seorang pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru).

Memang tidak dapat dipungkiri Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan yaitu Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, dan Rumbai Pesisir telah mengalami banyak kemajuan yang mengundang banyak orang untuk tinggal dan berusaha hidup di dalamnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 943.961 ribu jiwa pada tahun 2012. Perkembangan yang cukup pesat ini menyebabkan timbulnya masalah sosial, yang salah satunya merupakan masalah pembinaan anak jalanan. Kinerja aparat pemerintah masih perlu dikembangkan, agar penanganan masalah pembinaan anak jalanan dapat lebih maksimal. Masalah sosial seperti anak jalanan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya tetapi dengan memaksimalkan kinerja dari Dinas Sosial dan Pemakaman diharapkan dapat mengurangi atau menekan jumlah anak jalanan, yang mana salah satu caranya adalah dengan cara meningkatkan pembinaan anak jalanan.

Pembinaan anak jalanan dapat dilakukan dengan pemberian keterampilan kepada anak jalanan. Keterampilan yang dimaksud dapat bermacam-macam. Bagi anak jalanan yang laki-laki dapat diajarkan keterampilan bengkel, sementara yang perempuan dapat diajarkan

keterampilan salon. Dengan keterampilan ini, diharapkan ketika anak jalanan tersebut keluar dari Dinas Sosial dan Pemakaman, maka anak tersebut akan menggunakan keterampilannya dari pada kembali ke jalan. Masalah lain yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam hal penanganan dan pembinaan anak jalanan adalah bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman belum memiliki fasilitas yang memadai untuk pembinaan anak jalanan.

Handoko (2001) menyatakan bahwa kinerja (*performance appraisal*) adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan dimana dalam kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Sedangkan menurut Simanjuntak (2005) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam hal ini mencakup kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja perusahaan yang dipengaruhi faktor intern dan ekstern.

Menurut Vetzal Rivai (2004 : 309) kinerja adalah : “merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. Nurminyah Hasibuan dalam Nita (2008 : 20) mengatakan pada dasarnya kinerja adalah hasil prestasi yang diperoleh baik karyawan, perusahaan, organisasi dan lain. Jadi dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa pengertian kinerja adalah hasil kerja yang diperoleh seseorang atau karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan

kepadanya yang didasarkan atas kemampuan dirinya.

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) juga pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan.

Menurut Kumorotomo dalam Pasolong, (2010:180) menggunakan beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi publik, antara lain :

1. Efisiensi yaitu menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.
2. Efektivitas yaitu apakah tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.
3. Keadilan yaitu mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepastian.
4. Daya Tanggap yaitu organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara atau pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena

itu organisasi secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan negatif mengenai birokrasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan. Maka dari itu pelayanan publik harus diperbaharui hari demi harinya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu kemampuan birokrasi publik untuk menampung dan mengelola aspirasi masyarakat haruslah ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Menurut Nazir (2003: 54), penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, dan suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa masa sekarang. John W. Creswell (2002: 1) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang

diselidiki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

Dalam penelitian ini, informan penelitian akan mengalami penambahan sampai informasi dan data yang diperoleh peneliti terkait masalah dalam penelitian ini yaitu tentang Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Pekanbaru. Dalam memperoleh data dari informan selanjutnya dengan menggunakan *snowball sampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian jumlahnya membesar (Sugiyono: 2003). Adapun responden dalam penelitian ini, akan di tentukan setelah peneliti terjun langsung ke lapangan dan setelah penulis menentukan lokasi sebagai lokus penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu untuk pengolahan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan, semua informasi yang dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

HASIL

Untuk mengetahui tentang Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Pekanbaru, penulis menggunakan Indikator Kinerja Organisasi Menurut Kumorotomo dalam Pasolong (2010:180), yaitu ;

- a. Efisiensi
- b. Efektivitas
- c. Keadilan

d. Daya tanggap

Untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator tersebut diatas, penulis akan menguraikan secara jelas seperti yang tercantum berikut ini ;

1. Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.

Menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam memanfaatkan faktor-faktor pendukung yang ada dalam pembinaan anak jalanan yang ada di kota Pekanbaru serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.

2. Efektivitas

Berkaitan seberapa jauh sasaran telah dapat dicapai, dan efisiensi menunjukkan bagaimana mencapainya, yakni dibanding dengan usaha, biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan. Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dengan perkataan lain efektivitas adalah hasil guna yang dicapai oleh organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuannya. Jadi, makna efektivitas memiliki konsep yang lebih luas dari pada konsep efisiensi. Efektivitas dapat berkaitan dengan

variabel internal dan juga berkaitan dengan variabel eksternal organisasi. Sedangkan efisiensi hanya berkaitan dengan proses internal organisasi, yaitu perbandingan yang rasional atau terbaik antara Input dengan Output.

3. Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keurunan, dan agamanya. Bias diartikan juga suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.

4. Daya Tanggap

Daya tanggap adalah meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru merupakan bagian dari daya tanggap Negara atau Pemerintah akan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Karena itu Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru harus tanggap dalam penanganan anak jalanan.

Menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam memanfaatkan faktor-faktor pendukung yang ada dalam pembinaan anak jalanan yang ada di kota Pekanbaru

serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.

PEMBAHASAN

Faktor-faktor apakah yang menghambat kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam membina anak jalanan di Pekanbaru

1. Faktor pendorong

Faktor pendorong kinerja penanganan anak jalanan yaitu Memang belum ada perda atau PP khusus yang mendasari penanganan anak jalanan, namun usaha pemerintah dalam hal ini kota Pekanbaru yaitu membuat keputusan tersebut yang berisi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial Kota Pekanbaru. Tim ini diantaranya bertugas melakukan penertiban dan pemberdayaan anak jalanan di Kota Pekanbaru. Selain itu, adanya dukungan dana anggaran dari pemkot dan pemprov juga menjadi salah satu faktor pendukung kinerja penanganan anak jalanan. Walaupun dinilai dana anggaran tidak mencukupi proses penanganan anak jalanan, akan tetapi hal itu lebih baik daripada tidak mendapat perhatian dari pemkot maupun pemprov itu sendiri.

Bidang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pelayanan sosial, serta bidang-bidang bantuan sosial. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, menyebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 : “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, dan Pasal 31 ayat 2 : “ Setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Isi pasal 34 dan pasal 31 tersebut menjelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk menangani anak jalanan. Langkah yang harus ditempuh Dinas Sosial dan Pemakman Kota Pekanbaru adalah aktif membina anak jalanan, di antaranya dengan menyeleksi yang mana yang masih layak dibina keluarganya dan yang harus dibina pemerintah melalui panti asuhan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang pendidikan untuk membina anak jalanan secara terus-menerus. Pihak keamanan mengadakan razia secara berkesinambungan agar anak jalanan merasa jera dan takut untuk berbuat macam-macam di jalanan. Usaha tersebut perlu didukung adanya spesifikasi sumber daya manusia yang memadai dalam penanganan anak jalanan, dari pembinaan sampai dengan pengentasan anak jalanan menjadi mandiri. Saat ini belum ada perda khusus yang mengatur anak jalanan di kota Pekanbaru, sehingga upaya penanganan anak jalanan di tingkat kota/kabupaten belum mendapatkan arah yang tepat dan efektif.

Penanganan anak jalanan di Kota Pekanbaru selama ini difokuskan pada pembinaan dan pelatihan. Terkait dengan Sapta Program yang dicanangkan oleh Walikota Pekanbaru yang bertujuan Pekanbaru bebas kemiskinan dan bebas pengangguran, Dinas Sosial dan Pemakman Kota Pekanbaru khususnya Bidang PMKS memiliki program sesuai dengan visi dan misi walikota, salah satu diantaranya Program Pekanbaru Bebas PGOT (pengemis, gelandangan, dan orang terlantar), WTS, dan anak

jalanan. Salah satu wujud program tersebut terkait dengan penanganan anak jalanan adalah dilakukannya patroli, tujuannya adalah mengingatkan pada anak jalanan untuk tidak di jalan pada jam sekolah.

2. Faktor penghambat

Kurangnya sumber daya manusia menjadi kendala terbesar dalam penanganan anak jalanan. Idealnya, ada tenaga sosial yang mendampingi anak jalanan tersebut selama sehari dua jam dan seminggu penuh. Akan tetapi, kinerja Dinsosial dan Pemakman Kota Pekanbaru juga mengalami kendala yaitu datangnya dari anak jalanan itu sendiri. Keinginan anak jalanan yang selalu berubah-ubah menyebabkan program yang dicanangkan untuk mereka tidak maksimal, terbukti terdapat alat-alat keterampilan untuk usaha tidak digunakan. Sehingga modal-modal ini menjadi sia-sia. Partisipasi masyarakat juga menjadi kendala pada penanganan anak jalanan ini. Kesadaran masyarakat dinilai rendah dalam menghadapi dan menyikapi keberadaan anak jalanan. Masih banyak masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan, padahal tindakan tersebut akan membuat anak jalanan semakin tidak mau dan berusaha mandiri. Banyak orang berpendapat, masalah tentang anak jalanan ini muncul akibat adanya kehamilan di luar nikah atau anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya tanpa alasan yang jelas. Sehingga akhirnya memilih jalanan untuk menghabiskan waktu. Pendapat ini tidak sepenuhnya tepat. Karena sebagian anak jalanan, ada yang berasal dari keluarga utuh dan memiliki identitas yang jelas. Namun beberapa faktor menjadikan mereka memilih meninggalkan keamanan

sebuah keluarga dan menikmati kebebasan di jalanan.

Masyarakat miskin hanya memiliki sedikit pilihan atas pekerjaan yang layak dan peluang yang terbatas untuk mengembangkan usaha mereka. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini seringkali menyebabkan mereka terpaksa melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan imbalan yang kurang seimbang dan kurang kepastian akan keberlanjutannya. Usaha yang dilakukan masyarakat miskin juga sulit berkembang karena menghadapi persaingan yang tidak seimbang, keterbatasan modal, serta kurangnya ketrampilan dan pendidikan. Bagi perempuan permasalahannya menjadi lebih kompleks karena negara melegitimasi diskriminasi upah bagi perempuan melalui UU Perkawinan Tahun 1974 pasal I yang mengatakan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumahtangga. UU ini yang dijadikan rujukan bagi pembuatan peraturan pengupahan. Oleh karena itu, masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin adalah terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang pengembangan usaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak.

SIMPULAN

Pelayanan publik akan menghasilkan *output* atau hasil yang baik kepada masyarakat apabila pelayan publik atau aparatur negara memiliki kinerja yang baik. Kinerja tiap pegawai akan berpengaruh pada keberhasilan tujuan organisasi. Kinerja organisasi juga menentukan apakah tujuan,

rancangan, dan manajemen organisasi tersebut sudah tercapai atau belum.

1. Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru khususnya bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial dalam menangani anak jalanan masih kurang baik. Usaha-usaha yang dilakukan bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial dalam menangani anak jalanan antara lain pembinaan, bimbingan mental, dan pemberian modal usaha. Akan tetapi, penjarangan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru belum mencapai target yang diinginkan.
2. Pemberian bantuan modal usaha tidak serta merta diberikan pada setiap Wanak jalanan yang membutuhkan, karena bantuan modal tersebut diberikan pada anak jalanan yang sudah terseleksi terlebih dahulu. Kendala yang dihadapi dalam usaha penanganan anak jalanan ini adalah sikap atau *mindset* anak jalanan yang tidak mau diatur sehingga menyebabkan target program bidang pelayanan dan pemberdayaan terhambat.
3. Kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia baik di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sumber dana anggaran yang kurang. Proses pendampingan anak jalanan seharusnya dilakukan hingga anak jalanan tersebut mandiri. Pengawasan terhadap pendampingan juga perlu dilakukan, sehingga apabila muncul masalah akan cepat diatasi. Sumber dana anggaran yang kurang disebabkan anggaran setiap tahun dari

pemerintah provinsi juga terbatas. Perlu adanya peningkatan pelatihan pegawai, peningkatan jumlah pegawai dan sumber anggaran untuk meningkatkan produktivitas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Dengan meningkatnya produktivitas, maka indikator kinerja seperti efisiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap akan ikut meningkat. Sehingga angka anak jalanan di kota Pekanbaru bisa ditekan seminimal mungkin.

4. Penanganan Anak Jalanan serta kemiskinan di Pekanbaru tentunya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Bahwa gelandangan dan pengemis sebagai sebuah kenyataan sosial kemasyarakatan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan perlu segera dilakukan penanganan secara efektif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai kalangan baik di masyarakat maupun pemerintah Provinsi Riau secara umum dan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya. Penanganan melalui hukum hendaknya selain membuat para Anak Jalanan jera juga sebaiknya memberikan kesadaran bagi mereka akan sebuah makna kehidupan seperti memberikan keterampilan dan memberikan pelatihan guna pembekalan bagi mereka menatap masa depan. Sehingga perda-perda yang telah mengatur hal itu benar-benar memiliki kepastian hukum serta berjalan secara terarah dan terencana dengan baik.
5. penanganan secara hukum melalui perda, tugas pemerintah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten-

kota untuk menangani masalah perkotaan pada umumnya dan gelandangan pada khususnya adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Rencana pembangunan pemerintah seharusnya mengedepankan pembangunan secara merata. Pembangunan hendaknya dilakukan dengan pola “dari desa ke kota” dan bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kencana, Inudkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: RinekaCipta.
- Mahmudi.2005.*Manajemen Kinerja Sektor Publik* . Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
- Mahsun.Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mangkunegara,Anwar Prabu. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy, J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pasolong.Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: RefikaAditama.
- Simanjuntak .J Payaman. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Surbaktidkk. Eds, 1997, *Prosiding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan: Study Rintisandi Kotamadya Bandung*, Jakarta. Kerjasama BPS dan UNICEF
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Usman,Husnaini. 2009. *Manajemen teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. 2008. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi, J. 2003. *Teori Oraganisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.